

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENCARI KERJA
DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
(STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019)**

Rizky Intan Pratiwi

NPP. 30.0371

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : intanpratiwi1403@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. Soenarko, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Baground (GAP) : There are still deficiencies in the implementation of job seeker ID cards in the city of Palembang due to a lack of public awareness and companies that do not participate in the implementation of the job seeker ID card program. The service for making job seekers' cards has been done easily online, but the public's interest and knowledge is still minimal and needs to be improved. **Purpose** : This research is to find out how the implementation of the job seeker's card program is expected to reduce the unemployment rate in the city of Palembang. **Method** : This study used a qualitative descriptive method with an inductive approach with data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation. **Result** : the findings obtained from the implementation of job seeker ID cards in Palembang City have been going well but not optimal due to the lack of awareness of the workforce, especially those who do not yet have a job to make job seeker ID cards and there are still many companies that have not implemented job seeker ID cards as a condition for applying for a job. The inhibiting factors come from the knowledge and knowledge of the community regarding this program which is still minimal and the lack of company participation in running this program. The supporting factors are that this program can be implemented online and the resources are sufficient enough so that it is hoped that this program will be successful.. **Conclusion** : From this study it was concluded that the Implementation of the Job Seeker's Card Program has been going well but needs to be improved so that this program can achieve maximum results.

Keywords: Implementation, Job seeker card, program

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Implementasi Kartu tanda pencari kerja di Kota Palembang masih terdapat kekurangan yang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dan perusahaan yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program kartu tanda pencari kerja. Pelayanan pembuatan kartu pencari kerja sudah dilakukan secara online dengan mudah namun minat dan pengetahuan masyarakat yang masih minim dan perlu ditingkatkan. **Tujuan:** Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program kartu tanda pencari kerja yang diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil /temuan:** temuan yang diperoleh implementasi kartu tanda pencari kerja di Kota Palembang telah berjalan baik namun belum optimal karena kurangnya kesadaran angkatan kerja khususnya yang belum memiliki pekerjaan untuk membuat kartu tanda pencari kerja dan masih banyak perusahaan yang belum menerapkan kartu pencari kerja sebagai syarat melamar pekerjaan. Faktor penghambat berasal dari pengetahuan dan pengetahuan masyarakat terkait program ini yang masih minim dan kurangnya partisipasi perusahaan dalam menjalankan program ini. Faktor Pendukung yaitu program ini dapat dilaksanakan secara online dan sumber daya yang cukup memadai sehingga harapannya program ini dapat berhasil. **Kesimpulan:** dari penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi Program kartu tanda pencari kerja telah berjalan baik namun perlu dilakukan peningkatan agar program ini dapat mencapai hasil maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, kartu pencari kerja, program

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja adalah salah satu Instansi Pemerintah pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan publik, Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diatur dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik di bidang ketenagakerjaan. Sebagai pemberi layanan kepada masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik agar terciptanya kepuasan masyarakat. Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu pendaftaran kartu tanda pencari kerja yang digunakan sebagai identitas pencari kerja dan ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Kartu tanda pencari kerja ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa seseorang belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja sekaligus digunakan sebagai data jumlah masyarakat Kota Palembang yang sedang mencari pekerjaan. Dengan adanya kartu ini memudahkan

dalam penyaluran tenaga kerja sesuai dengan minat bakat dan latarbelakang pendidikannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang pada tahun 2021 Kota Palembang merupakan wilayah dengan TPT(Tingkat Pengangguran Tertinggi) di Provinsi Sumatera Selatan dengan persentase 10,11% dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 832.803 orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 748.610 orang. Angka pengangguran yang semakin tinggi karena sedikitnya perusahaan maupun lapangan pekerjaan sehingga angkatan sekolah yang baru lulus tidak mendapatkan pekerjaan. Pelayanan kartu tanda pencari kerja di Kota Palembang sudah dapat dilakukan secara online, namun yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat untuk membuat kartu pencari kerja ini masih kurang. Selain itu partisipasi perusahaan untuk mendukung program ini sangat perlu ditingkatkan karena masih banyak perusahaan yang tidak menjadikan kartu pencari kerja sebagai syarat memperoleh pekerjaan.

kartu pencari kerja atau AK1 adalah kartu identifikasikan bahwa Pemilik kartu belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai syarat melamar pekerjaan di kantor Pemerintah maupun swasta. Kegunaan dari kartu AK1 ini selain sebagai kartu identitas pencari kerja yang dapat memudahkan pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan juga digunakan sebagai data ukuran statistik pencari kerja di Kota Palembang. Kegunaan kartu pencari kerja ini sangat penting yaitu sebagai landasan bagi Pemerintah untuk mengetahui jumlah pencari kerja di Kota Palembang sehingga dengan adanya data ini Pemerintah dapat mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk menekan angka pengangguran dan memperluas lapangan pekerjaan. Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, pelayanan kartu pencari kerja sudah bisa dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor, namun ada hal hal yang perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk membuat kartu pencari kerja ini, sehingga dalam penerapannya perlu koordinasi dengan pihak terkait agar program kartu tanda pencari kerja ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan yaitu sebagai tanda bahwa seseorang tersebut belum memiliki atau sedang mencari pekerjaan sekaligus menjadi sebagai data statistik pencari kerja.

Masa berlaku kartu pencari kerja yaitu selama dua tahun dan wajib lapor setiap 6 bulan jika pencari kerja belum mendapat pekerjaan. Permasalahan Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada bidang Tenaga Kerja salah satunya yaitu pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan tidak melapor apabila telah mendapatkan pekerjaan sehingga Dinas Tenaga Kerja sulit mendeteksi apakah pembuat Kartu tanda pencari kerja tersebut telah mendapatkan pekerjaan atau belum. Laporan Kartu tanda pencari kerja tersebut sangatlah penting sebagai parameter seberapa tinggi tingkat pengangguran di Kota Palembang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil

Ada beberapa permasalahan yang terdapat dalam pelayanan kartu tanda pencari kerja. Pertama, angka pengangguran yang semakin tinggi akibat pandemi covid dan saat ini dalam masa pemulihan setelah covid dimana banyak dibuka lapangan pekerjaan baru. Kedua, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program kartu tanda pencari kerja ini selain itu kesadaran masyarakat untuk membuat kartu pencari kerja masih sangat minim yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi perusahaan untuk menjadikan kartu pencari kerja sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan, Keempat pelayanan kartu pencari kerja dapat dilakukan secara online namun perlu ditingkatkan kembali dari segi kemudahan pendaftaran, kelima masyarakat yang telah mendapa pekerjaan tidak melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja sehingga tidak akuratnya data penerima kerja dari program kartu tanda pencari kerja.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penerapan dan strategi dalam menjalankan program Kartu Tanda Pencari Kerja. Penelitian Joice Tombi berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang pelayanan Pemberian Kartu tanda pencari kerja (Ak.1) Pada Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju (2018) menemukan bahwa Pada pelaksanaannya sesuai hasil temuan sudah berjalan cukup baik, petugas pelayanan pemberian AK1 telah menjalankan tugas dengan baik sesuai mekanisme dan sesuai standar pelayanan, hanya saja belum sesuai dengan harapan, baik dari dinas maupun dari masyarakat yang menerima pelayanan, hal ini dilihat dari sumber daya pendukung yang terdiri dari sumberdaya manusia dan sarana prasarana terlihat belum memadai. Penelitian Machroeff Sukses berjudul Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang (2018), Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan untuk dimensi tangibles belum cukup baik, reliability kurang baik, responsiveness kurang maksimal, assurance kurang baik, empathy belum cukup baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kualitas pelayanan pembuatan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang belum berhasil. Penelitian Zelita Valda Vania yang berjudul Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Kartu tanda pencari kerja (Kartu AK-1) Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (2020) dengan hasil Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu strategi yang tepat adalah opsi strategi SO, dengan mengoptimalka kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait “ Implementasi Program Kartu Tanda Pencari Kerja di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2019)”. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) dalam Syafri and Setyoko (2017) menyatakan bahwa ada beberapa indikator pemicu penentu kesuksesan implementasi antara lain komunikasi, sumber daya, Disposisi, dan struktur birokrasi pelaksana.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Program Kartu Tanda Pencari Kerja di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019).

II. METODE

Menurut Sugiyono (2019:2) menjelaskan secara singkat tentang metode penelitian bahwasannya “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Menurut (Simangunsong,2017) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan lingkungan alamiah, dimana penelitian dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan agar sumber data yang dapat bisa secara langsung bersifat naturalistik, tidak manipulatif dan terbuka pada apapun yang akan timbul kedepannya. Berdasarkan uraian pada penjelasan beberapa ahli, maka dapat disimpulkan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif dapat digunakan sebagai metode penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan masalah dengan menggunakan kata kata dan fakta dalam pemecahan masalahnya sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan 3 (tiga) cara yaitu, *observasi* (pengamatan), *interview*(wawancara), dan dokumentasi. Sehingga akan menggambarkan bagaimana Implementasi Kartu Tanda Pencari Kerja di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang dipilih yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang IPK dan Produktivitas, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, dan Masyarakat (pencari kerja).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pakar Ilmu Kebijakan Publik, Edward III, Tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh pembuat keputusan. Akan tetapi pada kenyataannya, tahapan implementasi begitu penting dikarenakan suatu kebijakan tidak akan berarti apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Pada hasil penelitian ini penulis meneliti Implementasi Program Kartu Tanda Pencari Kerja

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Bab IV Pemberdayaan, Pendaftaran dan Penempatan Tenaga Kerja Pada Bagian ke dua Pendaftaran Pencari kerja dalam pasal 15 dijelaskan bahwa;

- a. Pencari kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan harus terdaftar pada instansi pelaksana.
- b. Pendaftaran pencari kerja dimaksudkan untuk memudahkan instansi pelaksana menyusun perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
- c. Tanda bukti pendaftaran pencari kerja, berupa Kartu AK1, oleh Instansi pelaksana.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut diharapkan terlaksananya penerapan yang baik terhadap program yang telah dirancang oleh Pemerintah. Dengan kata lain implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

3.1 Implementasi Kartu tanda pencari kerja di Kota Palembang

1. Komunikasi

Dalam proses berjalannya implementasi Program Kartu tanda pencari kerja di Kota Palembang tentunya harus terjalin komunikasi yang baik dengan semua struktur organisasi satu dengan yang lainnya, karna apabila dalam kondisi tersebut tidak terjalin komunikasi yang baik maka akan ditemukan berbagai kesulitan untuk mejudkan tujuan dari kebijakan yang diharapkan.

2 Sumber Daya

Pada proses implementasi setiap kebijakan publik harus didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya berperan penting dalam mencapai sasaran tujuan pada implementasi suatu kebijakan publik, walaupun suatu kebijakan telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat atau pencari kerja, namun pada pelaksanaannya implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan proses implementasi kebijakan maka proses implementasi kebijakan akan sulit berjalan dengan baik secara efektif dan efisien.

3. Disposisi

Dalam proses implementasi kebijakan diperlukan dukungan serta sika positif dari para pelaksana atau implementor kebijakan tersebut. Sikap pelaksana sangat berperan penting karna mereka langsung terjun ke kelompok sasaran yaitu masyarakat. Implementor dalam menjalankan suatu kebijakan serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan sangat berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan dalam proses Implementasi Kartu tanda pencari kerja atau (AK1). Disposisi mempengaruhi proses implementasi, yang mana indikator dalam Disposisi yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah indikator pengangkatan birokrat dan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang akan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sebuah organisasi yang berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi fasilitator atau berwenang dalam proses implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi yang dimaksudkan yaitu pembagian wewenang dalam sebuah organisasi dengan tujuan tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam organisasi tersebut sehingga proses implementasinya tidak terganggu.

3.2 Prosedur pelayanan Program Kartu tanda pencari kerja di Kota Palembang

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja dijelaskan bahwa pelayanan pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja yaitu merupakan kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada Bab IX pada bagian Administrasi Tenaga Kerja Instansi Pelaksana melakukan penataan dan pengelolaan Administrasi Tenaga Kerja yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah dalam rangka mengoptimalisasi pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja wajib mendaftarkan diri kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sebagai pelaksana program Kartu tanda pencari kerja. Dalam penjelasan peraturan tersebut pada kenyataannya masih banyak pencari kerja yang tidak mendaftarkan diri untuk membuat Kartu tanda pencari kerja dengan berbagai alasan. Selain itu masih ada Perusahaan sebagai penerima kerja yang tidak menggunakan syarat Kartu tanda pencari kerja sebagai persyaratan untuk memperoleh pekerjaan.

Prosedur pendaftaran Kartu tanda pencari kerja secara online diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran jika dibandingkan dengan sebelumnya yaitu secara manual dengan cara datang langsung Ke Kantor Dinas Tenaga Kerja. Dengan kemudahan pendaftaran tersebut harapannya lebih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Kartu tanda pencari kerja di Kota Palembang

1. Faktor Pendukung

a. Kebijakan Pemerintah atau Landasan Hukum

Kebijakan Pemerintah atau Landasan Hukum untuk menguatkan program itu sendiri. Landasan hukum tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dengan adanya landasan hukum akan menciptakan kejelasan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan dan landasan hukum yang sangat jelas dan tegas akan membuat pelaksana kebijakan patuh serta menjalankan tugas nya dengan sesuai dengan peraturan dan dapat

dijadikan alat kontrol bagi masyarakat apakah para pelaku kebijakan menjalankan kebijakan dengan baik dan benar.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan. Dalam penerapan program Kartu tanda pencari kerja atau AK1 di Kota Palembang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yaitu sumber daya sarana dan prasarana. Harapannya dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik maka proses Implementasi Kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai target.

2. Faktor Penghambat

a. Ketidaklengkapan persyaratan yang dimiliki calon pencari Kerja

Dalam proses Implementasi Kebijakan Program Kartu tanda pencari kerja terdapat faktor yang menjadi penghambat yaitu ketidaklengkapan persyaratan calon pencari kerja. Dari wawancara yang dianalisis oleh peneliti terhadap calon pencari kerja, salah satu penghambat yang dialami oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang adalah dari pencari kerja itu sendiri. Kurangnya pemahaman tersebut menjadi salah satu faktor penghambat tersebut.

b. Kurangnya Sosialisasi Kartu tanda pencari kerja Kepada Masyarakat dan Instansi

Faktor Penghambat yang lain dalam pelaksanaan Implementasi Kartu tanda pencari kerja di Kota Palembang yaitu kurangnya sosialisasi mengenai Kartu tanda pencari kerja kepada Masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Kartu tanda pencari kerja tersebut menyebabkan jumlah pengangguran di Kota Palembang tidak sesuai jumlahnya dengan pendaftar Kartu tanda pencari kerja. Selain itu masih banyak perusahaan yang tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja seperti pada Kebijakan Program Kartu tanda pencari kerja ini.

c. Kurangnya partisipasi penyedia kerja (perusahaan) untuk mendukung Program Kartu Tanda Pencari Kerja

Pada pelaksanaan program kartu tanda pencari kerja masih kurangnya partisipasi penyedia kerja untuk mendukung adanya program kartu tanda pencari kerja ini, hal ini ditandai dengan masih banyaknya perusahaan yang tidak mencantumkan kartu tanda pencari kerja sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan sehingga menyebabkan anggapan masyarakat pencari kerja bahwa kartu tanda pencari kerja ini tidaklah penting. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perusahaan wajib mencantumkan persyaratan administratif berupa kartu AK1 pada setiap persyaratan administratif yang dibutuhkan.

3.4. Upaya Pemerintah dalam mengatasi Faktor Penghambat Program Kartu tanda pencari kerja

1 Dimensi Komunikasi

Pada dimensi ini yang perlu dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada setiap masyarakat pencari kerja maupun usia produktif yang belum memiliki pekerjaan. Selain melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, Dinas Tenaga Kerja juga perlu memberikan sosialisasi kepada pihak pemberi kerja baik instansi pemerintah maupun pihak swasta agar dapat bekerjasama dalam penerapan program Kartu tanda pencari kerja.

2. Dimensi Sumber Daya

Pada dimensi ini upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang yaitu meningkatkan kualitas pegawai yang bertugas melayani pendaftar Kartu tanda pencari kerja dengan melakukan pelatihan dan evaluasi hasil kerja. Selain itu Pemerintah Kota Palembang juga perlu meningkatkan Sumber Daya manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan kerja yang bertujuan agar kualitas pencari kerja dapat lebih baik sehingga memudahkan dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Dimensi Disposisi

Dalam dimensi ini upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah yaitu melakukan evaluasi terkait pencapaian dari pegawai dalam pelayanan publik serta memberikan reward kepada pegawai yang mampu memberikan inovasi dalam implementasi Program Kartu tanda pencari kerja

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Dalam dimensi ini upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah yaitu membuat kebijakan yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait dan SOP khusus pelaksanaan Program Kartu tanda pencari kerja sehingga tidak ada lagi perusahaan yang tidak menerapkan syarat Kartu tanda pencari kerja sebagai syarat untuk mendaftar pekerjaan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Kartu Tanda Pencari Kerja di Kota Palembang telah dipermudah dengan dapat dilakukan pendaftaran secara online, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam Implementasinya baik dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi, pada dimensi komunikasi sangat perlu ditingkatkan karena kurangnya komunikasi dapat menghambat terlaksananya program kartu tanda pencari kerja ini. Harapannya dengan terjalin komunikasi yang baik antar pihak dapat membuat program ini berjalan dengan efektif. Dalam mengurangi masalah yang terjadi terutama minat masyarakat untuk mendaftar kartu tanda pencari kerja, diperlukan adanya kerjasama dengan perusahaan terkait untuk menjadikan syarat kartu tanda pencari kerja sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Selain itu Dinas Tenaga Kerja dapat membuat website pelaporan secara online bagi masyarakat yang

telah diterima bekerja agar tersedianya data akurat jumlah pencari kerja yang telah mendapatkan melalui kartu tanda pencari kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Program Kartu tanda pencari kerja (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan tenaga kerja) di Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam proses Implementasi Program Kartu tanda pencari kerja di Kota Palembang dengan beberapa kesimpulan yaitu Implementasi Program Kartu Tanda Pencari Kerja di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Prosedur dalam pelaksanaan Program Kartu Tanda Pencari Kerja dapat dilaksanakan secara online sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pendaftaran Kartu Tanda Pencari Kerja. Prosedur pelaksanaan secara online tersebut terkadang terkendala website yang tidak bisa diakses sehingga memperlambat pelayanan yang diberikan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Program Kartu Tanda Pencari Kerja yaitu kurangnya sosialisasi mengenai Kartu tanda pencari kerja kepada Masyarakat selain itu kesadaran angkatan kerja masih sangat rendah sehingga Kartu tanda pencari kerja belum dapat digunakan untuk mengukur sepenuhnya tingkat pengangguran di Kota Palembang. Faktor penghambat selanjutnya yaitu pada pelaksanaan program kartu tanda pencari kerja masih kurangnya partisipasi penyedia kerja untuk mendukung adanya program kartu tanda pencari kerja ini, hal ini ditandai dengan masih banyaknya perusahaan yang tidak mencantumkan kartu tanda pencari kerja sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Implementasi Program Kartu Tanda Pencari Kerja yaitu dengan memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat serta menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sebagai pemberi kerja. Perlu adanya sosialisasi kepada perusahaan agar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program kartu tanda pencari kerja ini. Selain itu perlu adanya kejelasan sanksi agar program ini dapat dilaksanakan dengan tertib.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga harus berdasarkan dengan Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang dirumuskan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, penulis berharap temuan mengenai implementasi kartu tanda pencari kerjaini dapat dijalankan dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Penelitian ini belum sempurna oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Program Kartu Tanda Pencari Kerja di Kota Palembang untuk menemukan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan Kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi*

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Joice Tombi, 2018. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang pelayanan Pemberian Kartu tanda pencari kerja (Ak.1) Pada Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju*. Skripsi Universitas Terbuka
<http://repository.ut.ac.id/id/eprint/8287>
- Suksesi, Machroeff. 2018. *Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang*. Skripsi Universitas Negeri Sriwijaya Palembang.
<https://repository.unsri.ac.id/15241/>
- Valda Vania, Zelita. 2020. *Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Kartu tanda pencari kerja (Kartu AK-1) Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat*. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri
<http://eprintis.ipdn.ac.id>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Kerja